

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-237/PJ/2020

TENTANG

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN
INSTANSI PEMERINTAH DESA SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Instansi Pemerintah, perlu diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan bagi Instansi Pemerintah untuk menggantikan NPWP Bendahara sebelumnya;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, mengatur mengenai Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh Instansi Pemerintah dan mengukuhkan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang Bendahara Penerimaannya telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Desa secara Jabatan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA SECARA JABATAN
- PERTAMA : Menerbitkan NPWP bagi Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Menerbitkan NPWP bagi Instansi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Mengukuhkan Instansi Pemerintah sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Saat mulai terdaftar (SMT) bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan sejak tanggal 1 April 2020.
- KELIMA : Saat mulai pelaporan usaha bagi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan sejak tanggal 1 April 2020.
- KEENAM : NPWP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, serta pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Masa Pajak Juli 2020 dan selanjutnya.
- KETUJUH : Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA menggunakan NPWP Bendahara untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Masa Pajak Juni 2020 dan sebelumnya.
- KEDELAPAN : Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA harus mengajukan perubahan data, aktivasi EFIN

(*Electronic Filing Identification Number*), permohonan Sertifikat Elektronik, dan aktivasi Akun PKP bagi Instansi Pemerintah yang dikukuhkan sebagai PKP, paling lambat 30 Juni 2020.

KESEMBILAN : NPWP yang diberikan berdasarkan permohonan Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja baru dalam tahun anggaran 2020 selain Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sejak Instansi Pemerintah terdaftar.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Pajak, para Direktur, para Tenaga Pengkaji, dan para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
6. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
8. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
9. Para Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI *OR*

NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-237/PJ/2020
 TENTANG
 PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU
 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI
 PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA
 SECARA JABATAN

DAFTAR PENERBITAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

NO-URUT	NPWP	NAMA WP	KPP TEMPAT TERDAFTAR
1	00.005.496.5-108.000	RINDAM IM MARKAS BESAR TNI AD KEMENTERIAN PERTAHANAN	KPP PRATAMA ACEH BESAR
2	00.011.046.0-108.000	KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	KPP PRATAMA ACEH BESAR
3	00.013.277.9-108.000	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
4	00.013.297.7-108.000	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG DITJEN IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
5	00.020.767.0-108.000	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SABANG DITJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN	KPP PRATAMA ACEH BESAR
6	00.020.791.0-108.000	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
7	00.023.365.0-108.000	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN	KPP PRATAMA ACEH BESAR
8	00.023.696.8-108.000	RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
9	00.027.024.9-108.000	LPKA Banda Aceh, Provinsi Aceh DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
10	00.027.484.5-108.000	LANUD MAIMUN SALEH MARKAS BESAR TNI AU KEMENTERIAN PERTAHANAN	KPP PRATAMA ACEH BESAR
11	00.027.489.4-108.000	LANUD SULTAN ISKANDAR MUDA MARKAS BESAR TNI AU KEMENTERIAN PERTAHANAN	KPP PRATAMA ACEH BESAR
12	00.027.789.7-108.000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
13	00.027.790.5-108.000	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
14	00.027.791.3-108.000	RUMAH TAHANAN NEGARA SIGLI DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
15	00.027.852.3-108.000	LAPAS KELAS III LHOK NGA DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
16	00.027.856.4-108.000	LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI DITJEN PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	KPP PRATAMA ACEH BESAR
17	00.043.097.5-108.000	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH DITJEN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	KPP PRATAMA ACEH BESAR
18	00.043.222.9-108.000	LPMP ACEH DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	KPP PRATAMA ACEH BESAR

NO URUT	NPWP	NAMA WP	KPP TEMPAT TERDAFTAR
19.974	00.182.870.6-735.000	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 HULU SUNGAI UTARA KAB. HULU SUNGAI UTARA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.975	00.182.871.4-735.000	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MURUNG PUDAK KAB. TABALONG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.976	00.182.872.2-735.000	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 TABALONG KAB. TABALONG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.977	00.182.874.8-735.000	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 TABALONG KAB. TABALONG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.978	00.182.884.7-735.000	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 HULU SUNGAI UTARA KAB. HULU SUNGAI UTARA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.979	00.182.885.4-735.000	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 HULU SUNGAI UTARA KAB. HULU SUNGAI UTARA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.980	00.182.886.2-735.000	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 HULU SUNGAI UTARA KAB. HULU SUNGAI UTARA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.981	00.182.887.0-735.000	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 TABALONG KAB. TABALONG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.982	00.183.145.2-735.000	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 HULU SUNGAI UTARA KAB. HULU SUNGAI UTARA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG
19.983	00.186.409.9-735.000	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABALONG TANJUNG DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA	KPP PRATAMA TANJUNG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Saiiran sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NP 1970311 199503 1 002



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-237/PJ/2020
 TENTANG
 PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU
 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI
 PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA
 SECARA JABATAN

DAFTAR PENERBITAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH DESA

NO URUT	NPWP	NAMA WP	KPP TEMPAT TERDAFTAR
1	00.007.709.9-108.000	DESA LAMBARO NEJID KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
2	00.007.711.5-108.000	DESA LAMBADEUK KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
3	00.007.718.0-108.000	DESA LAMGURON KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
4	00.007.729.7-108.000	DESA LAMTUTUI KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
5	00.007.750.3-108.000	DESA LAMTEUNGOH KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
6	00.007.758.6-108.000	DESA MEUNASAH TUHA KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
7	00.007.764.4-108.000	DESA LAM AWE KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
8	00.007.793.3-108.000	DESA GAMPONG BARO KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
9	00.007.802.2-108.000	DESA LAMTEH KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
10	00.007.866.7-108.000	DESA LAM MANYANG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
11	00.007.885.7-108.000	DESA LAM ISEK KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
12	00.007.893.1-108.000	DESA GURAH KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
13	00.007.906.1-108.000	DESA LAMKEUMOK KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
14	00.007.913.7-108.000	DESA LAM RUKAM KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
15	00.007.935.0-108.000	DESA LAM GEU EU KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
16	00.007.936.8-108.000	DESA LAM LUMPU KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
17	00.007.951.7-108.000	DESA PAYA TIENG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
18	00.007.952.5-108.000	DESA LAM HASAN KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
19	00.007.966.5-108.000	DESA AJUEN KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
20	00.007.969.9-108.000	DESA RIMA JEUNEU KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
21	00.007.970.7-108.000	DESA RIMA KEUNEUROM KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
22	00.007.977.2-108.000	DESA LAMPISANG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
23	00.007.982.2-108.000	DESA BEURADEUN KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
24	00.007.987.1-108.000	DESA KEUNEU EU KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
25	00.008.005.1-108.000	DESA BUENG CEUKOK KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
26	00.008.010.1-108.000	DESA BINEH BLANG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
27	00.008.023.4-108.000	DESA COT MALEM KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
28	00.008.026.7-108.000	DESA COT KARIENG KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
29	00.008.034.1-108.000	DESA MEUNASAH BARO KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
30	00.008.036.6-108.000	DESA ATEUK LUENG IE KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR
31	00.008.049.9-108.000	DESA LAM GAPANG KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR	KPP PRATAMA ACEH BESAR

NO URUT	NPWP	NAMA WP	KPP TEMPAT TERDAFTAR
74.945	00.177.996.6-305.000	DESA KURNIA JAYA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.946	00.177.997.4-305.000	DESA LALANG JAYA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.947	00.193.758.0-305.000	DESA LALANG KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.948	00.193.802.6-305.000	DESA PADANG KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.949	00.193.820.8-305.000	DESA KELUBI KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.950	00.193.822.4-305.000	DESA SELINGSING KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.951	00.193.823.2-305.000	DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.952	00.193.830.7-305.000	DESA JANGKAR ASAM KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
74.953	00.193.974.3-305.000	DESA LILANGAN KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u. b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP 1970311 199503 1 002



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-237/PJ/2020
 TENTANG
 PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU
 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI
 PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA
 SECARA JABATAN

DAFTAR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

NO URUT	NPWP	NAMA WP	KPP TEMPAT TERDAFTAR
1	00.118.573.5-906.000	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I DENPASAR DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KPP PRATAMA BADUNG UTARA
2	00.182.402.8-034.000	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
3	00.133.713.8-074.000	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT
4	00.118.452.2-023.000	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN
5	00.159.733.5-061.000	LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (LLP-KUKM) KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN
6	00.003.130.2-013.000	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS" JAKARTA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA
7	00.144.698.8-423.000	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG DITJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING
8	00.141.625.4-424.000	RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
9	00.013.414.8-404.000	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN, BOGOR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	KPP PRATAMA BOGOR
10	00.013.416.3-404.000	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN, BOGOR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	KPP PRATAMA BOGOR
11	00.044.919.9-404.000	RUMKIT TK.IV SALAK KEDAM III/SLW MARKAS BESAR TNI AD KEMENTERIAN PERTAHANAN	KPP PRATAMA BOGOR
12	00.140.837.6-722.000	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR
13	00.182.413.5-943.000	BANDAR UDARA KUABANG DI KAO DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KPP PRATAMA TOBELO

14	00.122.875.8-112.000	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MEDAN DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN
15	00.144.778.8-301.000	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG DITJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI *OR*
NIP 19703 11 199503 1 002